

**KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM PROSES POLITIK
PEMERINTAHAN DI DAERAH STUDI KASUS PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA KOTA PEKANBARU (PERIODE 2008 – 2013)**

MUSLIYANDI

Dosen Pembimbing : DR. HASANUDDIN,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: musliyandi@hotmail.com

ABSTRAK

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebenarnya telah ada sejak awal masa Orde Baru berdiri hingga sekarang yang lebih mencitrakan dalam dunia pendidikan. Sehingga tidak mengherankan PGRI ini selalu memiliki penambahan anggota yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dengan jumlah massa yang mayoritas guru dan dosen ini PGRI ini telah berhasil sehingga dari keberhasilan tersebut peneliti yaitu : Bagaimana aktivitas/implementasi Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggota ?, dan Apa saja faktor yang berpengaruh pada Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami aktivitas/implementasi PGRI Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan faktor yang berpengaruh pada PGRI Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan bagi PGRI Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi dan perannya kedepan agar lebih baik. Lokasi penelitian bertempat di Kota Pekanbaru yaitu pada Pengurus PGRI Kota Pekanbaru, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan *key informan* sebagai sumber informasi tentang penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa PGRI Pekanbaru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya lebih menekankan artikulasi kepada Pemerintah, DPRD Pekanbaru, dan Partai Politik melalui hubungan personal dan kedekatan PGRI Pekanbaru itu sendiri kepada mantan anggotanya. Dengan jumlah massa yang banyak PGRI Pekanbaru dapat melewati saringan demokrasi untuk menempatkan perwakilannya di DPRD Pekanbaru dan Partai Politik.

Kata Kunci: Kelompok Kepentingan, Proses Politik, Artikulasi Kepentingan

**KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM PROSES POLITIK
PEMERINTAHAN DI DAERAH STUDI KASUS PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA KOTA PEKANBARU (PERIODE 2008 – 2013)**

MUSLIYANDI

Guide Lecturer: DR. HASANUDDIN, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: musliyandi@hotmail.com

ABSTRACT

Republic of indonesia teacher coalitions (pgri) sebanar have been there since beginning bew order time has stood until now yangn more mencitra in the world of education. so that not amazing pgri this always has member increasing enough significant every year it. with total mass manyoritas teacher and this lecturer pgri this success so that from success researcher that is: how does city republic of indonesia teacher coalitions activity/implementation pekanbaru in memperjuang member importance? , and everything factor haves city republic of indonesia teacher coalitions pekanbaru in memperjuang the member importance? .

This watchfulness aim realizes activity/implementation pgri city pekanbaru in memperjuang member importance and factor haves pgri city pekanbaru in memperjuang the member importance. this watchfulness use upon which for pgri city pekanbaru in runs function and the character to the fore so that better. watchfulness location bertempat at city pekanbaru that is in board pgri city pekanbaru, region parliament office (dprd) city pekanbaru and city education official pekanbaru. this watchfulness kind qualitative watchfulness with descriptive method. in researcher data collecting uses interview technique, observation and documentation. by using key informant as information source about this watchfulness.

Based on watchfulness result in skripsi this, inferential that pgri pekanbaru in run function and the task more emphasized articulation to government, drpd pekanbaru, and policies party passes hungan personal and nearness pgri pekanbaru itself to former the member. with total mass many pgri pekanbaru can pass by democracy filter to laid the representation at dprd pekanbaru and policies party

Keywords: importance group, policies process, importance articulation

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 BAB XIII yang menyangkut Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 telah dijelaskan bahwa penting dan sangat berpengaruhnya pendidikan dalam kanca Pembangunan Negara. Ini dijelaskan betul dalam Pasal 31 Ayat 4 bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Salah satu strategi pemerintah untuk menangani amanah tersebut adalah dengan melakukan pementapan hubungan kerjasama antara lembaga pemerintah dengan kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang secara tidak langsung ikut berperan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dinilai kini Guru lebih sebagai obyek politik, administratif dan birokratis. Keberdayaannya merasa terpasung, kurang diperhatikan dan tidak berkembang. Inovasi pendidikan telah dilakukan tetapi belum menyentuh upaya perbaikiakan kesejahteraan secara ideal. Memahami keterbatasan, ketidak berdayaan dalam mengartikulasi kebijakan politik pemerintah, guru membentuk organisasi yang dapat menampung kepentingannya dengan nama; ”Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setelah Indonesia merdeka pada tanggal 25 November 1945 sebagai kesadaran guru dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun. Guru disini bangkit sendiri dengan kesadaran mereka untuk kesejahteraannya dan mengandalkan organisasi PGRI ini yang dibentuk sebagai harapan menjadi kelompok kepentingan dan penekan bagi guru, tempat menyalurkan aspirasi kepentingan guru, alat perjuangan menuntut kesejahteraan dan mampu memberikan advokasi hukum.

Meskipun Pemerintah telah menghormati dan bekerjasama antar lembaga, yakni PGRI. Akan tetapi PGRI acap kali melakukan preasure kepada Pemerintah dibanding bentuk mediasi yang dinilai cukup baik. Namun dari hasil pra penelitian di PGRI Pekanbaru, penulis menemukan beberapa fenomena lainnya yang bersinggungan dengan politik pemerintahan yang terjadi di dalam PGRI Pekanbaru yakni sebagai berikut:

1. Adanya banyak anggota PGRI Pekanbaru, yakni kaum Guru mengalami beberapa tidakan kurang menyenangkan selama melakukan tugas. Serta kebijakan PGRI banyak menyinggung hingga keranah politik yakni interaksi

PGRI Pekanbaru dengan Pemerintah hingga Badan Legislatif yakni DPRD Kota Pekanbaru di dalam Komisi III.¹

2. Banyak gerakan guru yang dilakukan bahkan bukan hanya kasus yang diatas, melainkan kasus yang menyeret Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Said Nurjaya yang berakhir di meja persidangan .²
3. Masa dari PGRI yang besar menjadi sumber daya dalam rekrutmen elite politik ikut terlibat sehingga menapaki posisi-posisi di pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan berdasarkan fenomena yang telah ada, maka penulis dapat menetapkan perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana aktivitas/implementasi Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggota ?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh pada Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memahami Proses Politik Pemerintahan di Daerah, yaitu :

- a. Untuk mengetahui PGRI dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia dalam politik pemerintahan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis
 1. Sebagai bahan masukan untuk PGRI Kota Pekanbaru dalam melaksanakan proses politik pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.
 2. Sebagai bahan informasi bagaimana PGRI Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingannya
 3. Sebagai bahan informasi memahami perkembangan dinamika yang terjadi pada proses politik pemerintahan dari sudut kelompok kepentingan.
- b. Kegunaan Akademis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

¹ *OpCit. Tribun Pekanbaru*, Selasa 19 Februari 2013.

² Dikutip dari tempo.co, Kamis 18 Maret 2004

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kelompok Kepentingan

Karena keberagamannya kelompok-kelompok kepentingan ini Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today: A World View* (1992)³ yang diedit bersama, membagi kelompok kepentingan dibagi atas 4 kategori, yaitu:

1. Kelompok kepentingan Anomik

Kelompok anomik muncul secara kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur.

Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

2. Kelompok kepentingan Non- Asosiasional

Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota.

Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.

3. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)

Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi.

Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

4. Kelompok Kepentingan Asosiasional

Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus.

Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

³ A.Rahman H.I.*Sistem Politik Indonesia*(Yogyakarta:Graha Ilmu,2007) hlm 88

2. Proses Politik

Proses politik merupakan dinamika perjalanan politik dalam sebuah negara. Proses politik ini tak ubahnya sebuah rotasi dalam sistem politik baik secara historis maupun secara realita dengan perspektif pendekatan sistem . Pergantian rezim kekuasaan dan pengambil kebijakan merupakan sebuah proses politik dalam perspektif historis. Proses politik secara historis merupakan sebuah upaya deskriptif-obyektif beberapa kejadian dan korelasinya dengan kejadian lainnya. Lebih lanjut diperlukan pendekatan yang integratif untuk menjelaskan unsur-unsur yang berinteraksi dan berproses (fungsional) dalam sistem politik. Ini yang harus dihindari.⁴

3. Pemerintahan

Dikatakan oleh Koswara bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah: (1) dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, (2) dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif .⁶ Selain itu menurut Black dan Champion ⁷, jenis penelitian kualitatif ini juga lebih bersifat luwes dalam menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki. Pemilihan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru banyak sekarang kebijakan pemerintah baik tingkat pusat bahkan hingga daerah telah diikuti Persatuan Guru Republik Indonesia dalam proses politik yang terdapat di pemerintahan. Karena hal inilah menarik meneliti *kapabilitas* dari Persatuan Guru Republik Indonesia ini.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan penulis langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang

⁴ Philipus, Ng dan Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hal 106-107)

⁵ Koswara E., *Teori Pemerintahan Daerah*,(Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta. 2001) hal 29

⁶ Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persad2005) hal 19-32.

⁷ *Ibid at hal 23.*

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu penulis mewawancarai langsung informan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni data tentang bagaimana PGRI Kota Pekanbaru membangun komunikasi dengan pemerintah.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder berupa laporan, ketetapan-ketetapan, dokumen-dokumen, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai proses politik pemerintahan di daerah studi kasus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang peneliti rasa cukup berkompeten dalam penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai proses politik pemerintahan yang dialami oleh informan terkait.

c. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang terkait dengan proses politik pemerintahan yang dilakukan dan dialami oleh PGRI Kota Pekanbaru.

Data yang diperoleh berupa berita dari media cetak, anggaran dasar dan rumah tangga PGRI, Tatib DPRD Pekanbaru, dan jurnal

4. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan mengenai perumusan permasalahan dalam penelitian ini guna mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. PGRI Pekanbaru sebagai Kelompok Kepentingan

PGRI sebagai salah satu kelompok kepentingan institusional memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁸

Ciri yang tampak pada PGRI Kota Pekanbaru merupakan Kelompok Kepentingan bisa dilihat manakala PGRI Pekanbaru sebagai Kelompok Kepentingan, yang memenuhi syarat sebagai Kelompok Kepentingan yang ditandai dengan :

- 1) Memusatkan perhatian kepada bagaimana mengartikulasi kepentingan PGRI terhadap Pemerintah sehingga dalam menyusun kebijakan dapat menampung kepentingannya.
- 2) Lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah.
- 3) Mengorganisirkan yang baik dalam memobilitas anggotanya dalam suatu kegiatan.

1) Tugas dan Fungsi PGRI Pekanbaru

Tugas dan Fungsi seperti halnya pada *all persone* atau *all organizatione* berperan menentukan dan memberi ketegasan untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang berguna bagi kelompoknya. Seperti yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya pada gambaran umum PGRI Pekanbaru juga mempertegas dan menentukan hal-hal yang menjadi kewajiban, yaitu :

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Membela, mempertahankan, mngamankan dan mengamalkan Pancasila.
- 3) Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) integritas bangsa dan serta menjaga tetap terjamin dan terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.
- 5) Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan/atau bermitra dengan PGRI.
- 7) Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional.

⁸ A.Rahman H.I.*Opcit.* hlm 88

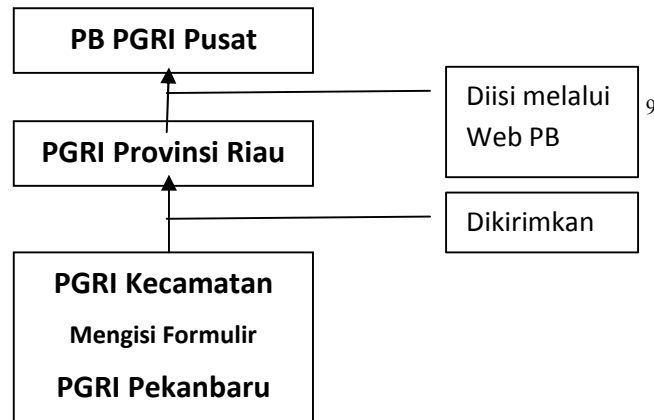
- 8) Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.
- 9) Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi
- 10) Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga–lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan/atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan/atau kebudayaan.
- 11) Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
- 12) Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI.
- 13) Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama.
- 14) Membentuk, memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI

2) Pola Rekrutmen PGRI Pekanbaru

PGRI pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang dapat menjadi anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. PGRI sebagai Kelompok Kepentingan juga dapat menjadi Kelompok yang adil dan solider dengan anggotanya. Dalam observasi serta penelaahan penulis pun dalam setiap kasus yang diemban PGRI Pekanbaru dari anggotanya PGRI Pekanbaru selalu berempati dalam mengupayakan persoalan anggotanya tersebut.

Dari pernyataan informan peneliti melihat PGRI Pekanbaru selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Visi dari PGRI Kota Pekanbaru itu sendiri.

Gambar 1.1



***)Sumber PGRI Kota Pekanbaru**

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa alur mengisi formulir yang diisi oleh anggota yang baru dan ingin menjadi anggota PGRI dimulai dari Formulir yang diambil dan isi dari PGRI tingkat Kecamatan yang berasal dari PGRI Kota Pekanbaru. Kemudian Pengurus PGRI Kota Pekanbaru mengirimkan formulir beserta data anggota kepada pengurus PGRI Provinsi Riau untuk dimasukkan dan disampaikan kepada Seksi Organisasi dan Kaderisasi di PB PGRI Pusat. Sehingga anggota yang mendaftar dari tingkat Ranting hingga Kabupaten dapat tergabung dalam database PGRI se-Indonesia yang tercatat di pusat.

Keanggotaan PGRI ini dapat berakhir melalui beberapa hal, yaitu atas permintaan sendiri, karena diberhentikan dan karena meninggal dunia. Jadi, jelas bahwa PGRI sebagai kelompok independent yang memberikan kebebasan kepada Hak-hak anggotanya untuk bermobilisasi diri dan tidak mengikat anggotanya.

3) Proses Penyampaian Pengaduan

Proses penyampaian pengaduan atau bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum disemua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parelemen, pejabat pemerintahan. Hal ini juga dilakukan oleh PGRI Pekanbaru terhadap masukan dan usulan dari para anggota PGRI maupun luar dari anggota PGRI Pekanbaru itu sendiri. Komitmen yang diemban PGRI Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dapat menjadi jelas

Kasus yang diemban, PGRI Pekanbaru secara hirarki berusaha mempermudah persoalan Guru dengan menyampaikan problem yang dialami. Akan tetapi dalam observasi yang peneliti lihat untuk penyampaian ini dirasa

⁹ <http://www.anggota.pgri.or.id>

peneliti sulit terealisasi dikarenakan PGRI Pekanbaru yang tidak memiliki bascamp atau kantor untuk administrasi yang jelas.

4) Pembentukan Tim Perumusan

Penyiapan tim perumus kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menangkap isu kebijakan. Adapun indikator dari penyiapan tim perumus adalah:

1) Melibatkan birokrasi terkait

Apakah dalam tim perumus ada melibatkan dengan birokrasi ?

2) Melibatkan pakar kebijakan

Apakah dalam tim perumus melibatkan pakar pendidikan ?

3) Melibatkan Sekbid yang Berwenang

Bagian Sekbid mana yang lebih koheren untuk menyelesaikan ?

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, PGRI tidak melibatkan tim ahli dalam hal penyiapan tim perumus dikarenakan beberapa kasus yang sesuai disampaikan oleh Ketua PGRI Pekanbaru permasalahan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan lain hal bagi kasus Said Nurjaya pada bulan November tahun lalu. Dari penelitian bahwa pada awal masuk permasalahan untuk menjadi tim perumusan ini ada melibatkan tim perumus kebijakan dari DPRD Kota Pekanbaru untuk penyelesaian tapi ketika masalah ini masuk ke meja hijau DPRD Pekanbaru tidak lagi melibatkan tim perumus kebijakan dikarenakan hanya meneruskan kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Kota Pekanbaru.

B. Proses Politik yang Menjadi Faktor Perjuangan PGRI Pekanbaru

Proses politik merupakan dinamika perjalanan politik dalam sebuah negara. Proses politik ini tak ubahnya sebuah rotasi dalam sistem politik baik secara historis maupun secara realita dengan perspektif pendekatan sistem. Pergantian rezim kekuasaan dan pengambil kebijakan merupakan sebuah proses politik dalam perspektif historis.

Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan.

Peneliti berusaha menjelaskan dari retorika yang peneliti alami dalam mendalami pembahasan penelitian. Sehingga penulis menjabarkan proses politik Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru ini melalui, yaitu, artikulasi melalui Partai Politik, Artikulasi melalui DPRD Kota Pekanbaru, dan Artikulasi PGRI Pekanbaru melalui Pemerintah Pekanbaru.

1. Artikulasi Kepentingan lewat Partai Politik

Dalam masyarakat modern parpol seringkali melakukan agregasi kepentingan/mengubah tuntutan-tuntutan menjadi alternatif kebijakan. Namun regulasi kelompok kepentingan lebih bebas dibandingkan partai politik, karena tidak berjuang mencari kursi parlemen. Kelompok kepentingan (interest groups) mengandung arti sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan juga diartikan organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan,¹⁰ seperti yang penulis coba bahas dalam hasil penelitian.

Dari observasi yang penulis lakukan selama mengimput data dan melakukan komunikasi dengan berbagai sumber. Didapat bahwa dari 10 anggota Dewan diatas memiliki hubungan atau jalinan komunikasi yang intens dengan PGRI Kota Pekanbaru diantaranya.

Tabel 1.1
Data Anggota Dewan

No	Nama	Jabatan	Partai
1	Ade Haartati Rahmat, M.Pd	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional
2	Drs. H. Bilhaya Athar, MA	Anggota	Demokrat
3	Donna Rosita Hutahuruk	Anggota	Partai Damai Sejahtera

***)Sumber Olah lapangan**

Dari tabel yang dijelaskan diatas menjelaskan hubungan antara anggota Dewan tersebut dengan PGRI Kota Pekanbaru karena history dari ke-3 anggota Dewan tersebut yang sangat dekat dan bersinggungan langsung dengan Kelompok Kepentingan ini. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti penulisan peneliti menemukan bahwa fenomena yang terjadi pada lapangan tidak sinkron dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dilihat dari observasi dilapangan yang menjadi faktor kedekatan PGRI Pekanbaru dengan beberapa anggota Dewan tersebut bukan hanya sekedar historical sang anggota dewan. Melainkan ada beberapa hal, yaitu :

1. Pengurus PGRI Pekanbaru banyak berasal dari lingkungan pendidikan swasta yaitu Muhammadiyah yang dekat ikatannya dengan Partai Amanat Nasional
2. Anggota Dewan tersebut banyak mendapat masukan suara dari lingkungan pendidik

Sehingga dari sudut pandang itu PGRI Pekanbaru sebenarnya memiliki *power* yang lebih dari partai politik itu sendiri meskipun PGRI Pekanbaru hingga saat ini tidak memiliki status menjadi anggota penuh dalam rapat yang terkait pendidikan.

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 383

2. Artikulasi lewat Dewan DPRD Pekanbaru

Tingkat pendidikan menjadi hal yang penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang siap menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama Kepala Daerah (eksekutif). Komposisi pendidikan dari 45 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel I.9 berikut.

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Formal Anggota DPRD Kota Pekanbaru
Periode 2009-2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	14 Orang	31,1%
2	D3	5 Orang	11,1%
3	S1	21 Orang	46,6 %
4	S2	5 Orang	11,1 %
Jumlah		45 Orang	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 mempunyai tingkat pendidikan yang cukup baik dengan mayoritas tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang (46,6 %).

Keinginan, harapan, keluhan dan semua permasalahan yang dihadapi guru dan dunia pendidikan dirumuskan sebagai masukan (*input*) yang diartikulasikan atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan (PGRI) kemudian diagresikan, dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif (DPRD) ini dan eksekutif (Pemerintah yang diwakili Dinas Pendidikan) nantinya.

3. Artikulasi lewat Pemerintah Pekanbaru

Artikulasi yang dilakukan oleh PGRI Kota Pekanbaru terhadap Pemerintah dilakukan melalui bentuk yaitu kepada Kepala Pemerintahan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Saadunir selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap akses APBD oleh pemerintah kota/urusan pendidikan Pekanbaru mengenai akuntabilitas bantuan dana kepada PGRI Kota Pekanbaru didapat bahwa PGRI Pekanbaru selalu mendapatkan dana dari para anggotanya dari pemotongan gaji mereka.

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Auliya selaku Ajudan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selaku informan lainnya menyatakan bahwa bentuk kerjasama antara PGRI Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sebagai mitra yang bekerjasama dalam urusan guru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan sekaligus untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru selalu berusaha menjaga kapabilitas guru-guru yang menjadi anggotanya agar mendapatkan harkat dan martabat yang lebih baik dari lingkungan fisik, sosial dan ekonomik domestik disekitarnya dengan berusaha memainkan peran yang jauh lebih besar dari fungsi utamanya sebagai kelompok kepentingan
2. Terdapat beberapa artikulasi yang berusaha dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam melindungi dan tetap menjaga komunikasi baik dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
3. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru lebih menjalankan fungsinya dari pada partai politik yang ada dikarenakan sumber daya anggota yang disebut massa yang cukup besar. Sehingga memungkinkan bagi Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru ikut dalam proses politik secara langsung di pemerintahan dengan menempatkan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri

Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru lebih membuka diri kepada elemen-elemen masyarakat diluar pendidikan agar Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru ini lebih dapat mengedepankan pendidikan bersama masyarakat dengan membentuk satu Sekbid lagi dalam urusan hubungan dengan masyarakat.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru lebih sering dan mengutamakan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru sebagai peseerta penuh dalam suatu pembuatan kebijakan sehingga Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru tidak perlu lagi menonjolkan perseorangan sebagai wakilnya di birokrasi.
3. Kepada Pemerintah Daerah yang dilimpahkan wewenang kepada Dinas Pendidikan Pekanbaru sebaiknya lebih merefleksikan diri kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru guna terjadi harmonisasi.
4. Kepada Pemerintah sebaiknya dapat mengatur manajemen yang baik kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru sehingga kejadian yang sudah terjadi dapat menjadi refleksi kepada Pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru dikemudian hari .

Daftar Pustaka

Literatur dan Karya Ilmiah :

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Budiarto. Peranan PGRI sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*) Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru (Masa Bakti PGRI Jawa Tengah 2004-2009).
- Bungin, Burhan (2005) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cooper, H.M. 1988. *The structure of knowledge synthesis' Knowledge in Society*, vol. 1, pp. 104
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia-Suatu Model Pengantar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Koswara E., 2001, *Teori Pemerintahan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta.
- Mas'ood Mohtar dan Dr. Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rais, Amien. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta : LP3ES.
- S, Bambang dan Sugianto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta : Grahadi.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta : YPAPI.
- Wilindaya, Infa. Peran Politik Muhammadiyah dalam Mewujudkan Pemerintahan Reformasi (Periode 1990-1998).

Peraturan Perundangan :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Sumber lainnya :

- HUT PGRI ke-67. 26 November 2012(<http://www.halloriau.com>)
- Mutu dan Profesionalisme Guru, 27 November 2012 (<http://www.riapos.com/>).
- Kerjasama dengan PGRI Pekanbaru, MPR-RI Sosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. 10 Januari 2013(<http://www.koranriau.com>)
- Sulistiyo. 2008. Kongres XX PGRI Dan Momentum Perubahan. *Suara Guru* , No.3